



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KERENTANAN KELOMPOK DIFABEL AKIBAT KRISIS IKLIM

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan oleh bangsa Indonesia adalah mitigasi perubahan iklim. Sebagaimana diketahui, perubahan iklim memberikan dampak yang beragam bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas atau difabel. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim karena mereka belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang memadai, baik dalam perumusan maupun implementasi kebijakan. Pada praktiknya, perubahan iklim ternyata berdampak secara tidak merata ke semua pihak, namun sudah pasti lebih membebani kelompok yang rentan dan terpinggirkan karena sering terabaikan dalam narasi, perencanaan, dan respons iklim. Terkait dampak iklim, kelompok difabel mengalami kerentanan berlapis (*layered vulnerability*) mulai dari kerentanan fisik, mental, ekonomi, sosial, akses informasi, hingga dampak lingkungan.

Setidaknya terdapat tiga dampak utama perubahan iklim terhadap kelompok difabel. *Pertama*, kerentanan keselamatan saat evakuasi bencana. Bagi orang yang tidak memiliki disabilitas, menyelamatkan diri dengan cara berpindah tempat merupakan hal yang relatif mudah dilakukan, tetapi bagi penyandang disabilitas, proses evakuasi justru dapat menjadi tantangan besar. *Kedua*, kerentanan ekonomi. Bencana alam akibat krisis iklim sering kali merusak suatu wilayah tertentu sehingga mengharuskan penduduknya pindah tempat tinggal maupun berganti mata pencaharian. Bagi orang yang tidak memiliki disabilitas, berpindah tempat dan berganti mata pencaharian di wilayah yang baru dapat menjadi solusi. Namun, bagi penyandang disabilitas, kondisi ini justru dapat memutus mata rantai penghidupan karena peluang kerja yang terbatas dan lingkungan baru yang belum tentu menerima mereka untuk bekerja. *Ketiga*, kerentanan pascabencana. Kerentanan ini serupa dengan kerentanan ekonomi, tetapi lebih menitikberatkan pada aspek aksesibilitas tempat tinggal. Dalam kasus bencana yang memerlukan relokasi, rumah atau lingkungan baru sering kali belum memiliki aksesibilitas setara dengan tempat tinggal sebelumnya. Akibatnya, penyandang disabilitas berisiko semakin terisolasi bahkan terancam keselamatannya.

Penyandang disabilitas, yang umumnya memiliki keterbatasan mobilitas, juga menghadapi kerentanan terhadap akses informasi. Dampak perubahan iklim yang memicu bencana seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas akan lebih dirasakan oleh kelompok ini. Mereka kerap tertinggal atau termarginalkan saat evakuasi maupun relokasi ke wilayah baru yang sering dibangun tanpa memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Kerentanan tersebut semakin diperburuk oleh keterbatasan aksesibilitas dan mobilitas dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan infrastruktur yang mendorong peralihan ke transportasi umum untuk mengurangi emisi karbon berpotensi memperbesar ketidaksetaraan apabila sarana tersebut tidak ramah disabilitas. Kondisi ini, misalnya, terlihat pada layanan Transjakarta yang sulit diakses oleh pengguna tongkat atau kursi roda karena sebagian besar halte masih menggunakan tangga curam akibat keterbatasan lahan.

Dari sisi akses terhadap informasi, sistem peringatan dini bencana yang belum inklusif menjadi tantangan besar. Selama ini, peringatan dini sering kali hanya disampaikan melalui sirine pengeras suara yang jelas tidak dapat menjangkau penyandang disabilitas runtu, netra, maupun disabilitas kognitif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek aksesibilitas informasi masih jauh dari memadai.

Hingga saat ini, isu disabilitas dan perubahan iklim juga masih jarang terwakili secara memadai dalam proses perumusan kebijakan. Minimnya partisipasi langsung penyandang disabilitas menyebabkan banyak kebijakan tidak memahami kebutuhan mereka secara komprehensif. Akibatnya, sejumlah kebijakan justru menjadi tidak relevan atau bahkan berpotensi memperburuk ketimpangan.

Sebagai solusi, diperlukan upaya mitigasi khusus yang berpihak pada kelompok difabel. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang inklusif serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang ramah disabilitas, termasuk jalur evakuasi yang mudah diakses oleh semua penyandang disabilitas. Selain itu, pendidikan dan pelatihan mitigasi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Penguatan sistem peringatan dini yang inklusif dan mudah diakses oleh semua kelompok disabilitas juga menjadi langkah penting. Dengan berbagai upaya tersebut, kerentanan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana dapat diminimalkan sehingga mereka terlindungi dari dampak buruk perubahan iklim.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI hendaknya mendukung pemerintah dalam mengakui dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks dampak perubahan iklim melalui alokasi sumber daya yang memadai serta perencanaan yang inklusif di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu mengintegrasikan perspektif disabilitas dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga implementasi, sekaligus memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas karena merekalah yang paling memahami kebutuhan yang harus dipenuhi dalam berbagai situasi.

Sumber

Kompas, 12 Agustus 2025;
republika.co.id, 29 April 2025; dan
tempo.co, 30 April 2025 dan 22 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*